Frontier Agribisnis

Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa (JTAM)

OPEN ACCESS

e-ISSN 0000-0000

https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/fag

EFEKTIVITAS DISTRIBUSI PUPUK SUBSIDI PADA TINGKAT PETANI PADI SAWAH DI KECAMATAN PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT

Distribution Effectiveness of Subsidized Fertilizer at the Level of Lowland Rice Farmers in Pelaihari Sub-District, Tanah Laut District

Aziz Dian Saputra*, Eka Radiah, Mariani

*Program Studi Agribisnis/Jurusan SEP, Fakultas Pertanian, Universitas Lambung Mangkurat
Jl. A. Yani km.36, Banjarbaru 70714, Kalimantan Selatan

Kata Kunci
Efektivitas; Distribusi; Pupuk Subsidi.

Korespondensi
Corresponding author
E-mail:
1810514110006@mhs.ulm.ac.id

Diterima: November 2022
Disetujui: 10 November 2022
Diterbitkan on-line : 1 Desember 2022)

ABSTRAK

Program pupuk subsidi merupakan salah satu program dari pemerintah yang pengadaan dan pendistribusiannya mendapat subsidi untuk kebutuhan petani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme perolehan pupuk subsidi, mengetahui efektivitas pencapaian distribusi pupuk subsidi pada petani padi sawah berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pendistribusian pupuk bersubsidi di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 37 petani penerima pupuk subsidi. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan mekanisme perolehan pupuk subsidi yang ada di Kecamatan Pelaihari, sudah sesuai dengan regulasi mekanisme perolehan pupuk subsidi yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk efektivitas distribusi pupuk subsidi di Kecamatan Pelaihari berdasarkan indikator 6 (enam) tepat yaitu tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu dan tepat jenis dikatakan cukup efektif dengan persentase 60,81% dikarenakan harga pupuk subsidi yang dibeli oleh petani masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), pupuk subsidi masih sering datang terlambat, petani masih belum melakukan pemupukan berimbang karena keterbatasan permodalan petani, dan masih terdapat petani yang tidak memperoleh jenis pupuk subsidi sesuai RDKK. Dalam pendistriusian pupuk subsidi di Kecamatan Pelaihari masih ditemukan kendala diantaranya masih ada ditemui petani menjual kembali pupuk subsidi ke petani lain, pupuk subsidi masih sering datang terlambat, petani yang belum melakukan pemupukan berimbang karena keterbatasan permodalan, jenis pupuk subsidi yang didapat petani tidak sesuai dengan RDKK dan masih minimnya pengawasan hingga ke hilir yaitu petani sehingga masih terjadi penyelewengan dalam penerima pupuk subsidi.

PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan salah satu penyokong terbesar perekonomian Indonesia yang diharapkan mampu mensejahterakan masyarakatnya melalui pembangunan di bidang pertanian terutama pada Sektor Pertanian, Subsektor tanaman pangan. Demi meningkatkan produksi hasil pertanian, diperlukan upaya pemupukan berimbang. Berbagai kebijakan yang dibentuk pemerintah guna mendukung meningkatkan tingkat produktivitas dan kualitas dari komoditas tanaman pangan telah dilakukan salah satunya adalah pupuk bersubsidi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPP Kecamatan Pelaihari, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan rekomendasi untuk pemupukan berimbang pada tanaman padi sawah di Kabupaten Tanah Laut yang dipaparkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Rekomendasi pupuk untuk tanaman padi di lahan sawah (kg/ha)

No.	Kecamatan	Urea	NPK	Organik
1	Panyipatan	200	300	500
2	Takisung	225	375	500
3	Kurau	200	300	500
4	Bumi Makmur	275	250	500
5	Bati-Bati	200	300	500
6	Tambang Ulang	250	300	500
7	Pelaihari	200	300	500
8	Bajuin	200	300	500
9	Batu Ampar	125	300	500
10	Jorong	150	300	500
11	Kintap	125	375	500

Sumber: BPP Kecamatan Pelaihari, 2022

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kemeterian Pertanian Republik Indonesia, Nomor: 18.1/Kpts/SR.130/B/KPA/01/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2014, dibentuknya tim verifikasi dan validasi guna menjamin penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat sasaran dan optimal. Verifikasi dan validasi dilakukan dengan menyelaraskan data penerima pupuk subsidi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK).

Tabel 2. Belanja subsidi pupuk tahun 2016-2022

No.	Tahun	Belanja Subsidi Pupuk (Triliun)
1	2016	26,853.26
2	2017	28,840.42
3	2018	33,612.73
4	2019	34,308.31
5	2020	31,099.69
6	2021	29,100.00
7	2022	25,300.00

Sumber: Kementerian Keuangan, 2022

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan yang dijelaskan pada Tabel 2, penurunan realisasi belanja pupuk bersubsidi pada tahun 2022 terjadi dikarenakan adanya penurunan volume dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Hal ini disebabkan adanya perbaikan dalam mekanisme penyaluran melalui peningkatan pengawasan pada saat penebusan pupuk bersubsidi dan dengan dilakukannya verifikasi dan validasi data penerima pupuk subsidi (Kusnandar, 2022).

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah mengatur besaran alokasi pupuk bersubsidi di Kecamatan Pelaihari dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Nomor: 343 Tahun 2021 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022.

Alokasi pupuk bersubsidi untuk Kecamatan Pelaihari tahun anggaran 2022 diantaranya pupuk Urea sebanyak 900 ton, pupuk SP-36 sebanyak 0,20 ton, pupuk ZA sebanyak 7 ton, NPK sebanyak 1.250 ton, NPK formula khusus sebanyak 0,40 ton, pupuk organik granul sebanyak 24,50 ton dan pupuk organik cair sebanyak 20 liter (BPP Kecamatan Pelaihari, 2022).

Dalam penyediaan pupuk bersubsidi, harus didasarkan pada rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK yang menjadi acuan kebutuhan petani untuk satu periode ke depan dalam kegiatan berusahatani. Selanjutnya RDKK yang telah disusun oleh kelompok tani yang dibantu oleh penyuluh lapangan, kemudian digunakan sebagai dasar dalam kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur (Jorgi, *et al*., 2019).

Berdasarkan keadaan dilapangan yaitu di Kecamatan Pelaihari pada aspek distribusi, masih banyak dijumpai penjualan pupuk dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dilakukan kios-kios resmi, hal ini dilakukan oleh pengecer dengan dalih sebagai biaya pengangkutan dari kios ke kelompok tani atau petani. Hal ini membuat terjadi peningkatan beban biaya produksi yang harus ditanggung oleh petani. Penyaluran pupuk bersubsidi sering mengalami keterlambatan sehingga membuat petani harus membeli pupuk nonsubsidi dengan harga jauh di atas HET agar dapat melakukan pemupukan secara tepat waktu. Permasalahan yang sering terjadi ialah penyelewengan dimana terdapat petani yang tidak terdaftar dalam kelompok tani namun mendapatkan subsidi pupuk karena masih minimnya pengawasan. Sebagian besar petani masih belum bisa menerapkan sistem pemupukan berimbang karena dalam penerapannya diperlukan permodalan yang cukup besar.

Dari latar belakang di atas maka perlu adanya penelitian mengenai keefektivitasan pendistribusian pupuk bersubsidi pada tingkat petani padi sawah di Kecamatan Pelaihari yang diukur berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, tepat harga, tepat jumlah, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu sesuai dengan kebijakan pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan alokasi pupuk bersubsidi.

Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian yaitu: (1) Mengetahui mekanisme perolehan pupuk subsidi pada tingkat petani padi sawah di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut; (2) Menganalisis efektivitas pencapaian distribusi pupuk subsidi pada petani padi sawah berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut; (3) Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pendistribusian pupuk bersubsidi di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

Kegunaan dari penelitian yaitu: (1) Bagi Universitas Lambung Mangkurat, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan keberhasilan dalam proses belajar mengajar dan sebagai bentuk pengabdian civitas akademika kepada masyarakat; (2) Bagi pemerintah dan instansi terkait, diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan landasan dalam mengambil kebijakan mengenai pupuk bersubsidi khususnya di Kabupaten Tanah Laut; (3) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan dan informasi serta menjadi penyempurna penelitian sejenis.

METODE

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini di lakukan menggunakan teknik *purposive* dengan pertimbangan luas lahan sawah terbesar di Kabupaten Tanah Laut. Waktu pelaksanaan penelitian ini akan dimulai dari bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022. Proses pelaksanaan terdiri dari tahap persiapan, pengumpulan data, penyusunan proposal, pengambilan data, sampai dengan penyusunan laporan hasil penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan pengamatan dan wawancara langsung dengan responden menggunakan kuesioner yang disiapkan. Data sekunder diperoleh melalui instansi-instansi terkait, studi kepustakaan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal penelitian, publikasi maupun penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini.

Metode Penarikan Contoh

Populasi dalam penelitian ini merupakan petani padi sawah yang menggunakan pupuk subsidi di Kecamatan Pelaihari. Desa dan kelurahan yang dipilih menjadi wilayah sampel penelitian adalah Desa Atu-Atu, Desa Pabahanan, Desa Pemuda, Desa Bumi Jaya dan Kelurahan Pelaihari yang dilakukan dengan metode acak sebanding (*Proportional Random Sampling*). Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 37 petani dari populasi petani padi sawah yang berada di lima desa tersebut.

Analisis Data

Untuk menjawab tujuan penelitian ini, data yang diperoleh akan diolah secara tabulasi, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan secara matematis dan dijelaskan secara deskriptif dengan cara mengidentifikasi mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi dilapangan pada di setiap saluran yang dilalui oleh produsen

hingga ke konsumen akhir yaitu petani padi sawah di Kecamatan Pelaihari.

Untuk menganalisis efektivitas distribusi pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat, efektifitas dapat diukur berdasarkan indikator 6 (enam) tepat diantaranya tepat harga, tepat waktu, tepat tempat, tepat jumlah, tepat mutu dan tepat jenis dengan rumus (Aziza, 2021):

1. Ketepatan Harga

$$\text{Ketepatan harga} = \frac{n_h}{N} \times 100\% \quad (1)$$

Dengan: n_h Jumlah responden yang mendapatkan pupuk subsidi sesuai HET (petani)
N Jumlah responden petani padi sawah (37 petani)

2. Ketepatan Tempat

$$\text{Ketepatan harga} = \frac{n_t}{N} \times 100\% \quad (2)$$

Dengan: n_t Jumlah responden yang mendapatkan pupuk subsidi dekat dengan lahan usahataninya (petani)
N Jumlah responden petani padi sawah (37 petani)

3. Ketepatan Waktu

$$\text{Ketepatan harga} = \frac{n_w}{N} \times 100\% \quad (3)$$

Dengan: n_w Jumlah responden yang perpendapat bahwa pupuk tersedia pada saat dibutuhkan (petani)
N Jumlah responden petani padi sawah (37 petani)

4. Ketepatan Jumlah

$$\text{Ketepatan jumlah} = \frac{n_j}{N} \times 100\% \quad (4)$$

Dengan: n_j Jumlah responden yang mendapatkan pupuk subsidi sesuai dengan dosis yang dianjurkan (petani)
N Jumlah responden petani padi sawah (37 petani)

5. Ketepatan mutu

$$\text{Ketepatan harga} = \frac{n_m}{N} \times 100\% \quad (5)$$

Dengan: n_m Jumlah responden yang perpendapat bahwa pupuk subsidi memiliki kandungan yang sesuai dan berlogo SNI (petani)
N Jumlah responden petani padi sawah (37 petani)

6. Ketepatan jenis

$$\text{Ketepatan harga} = \frac{n_J}{N} \times 100\% \quad (6)$$

Dengan: n_J Jumlah responden yang perpendapat bahwa jenis pupuk subsidi sesuai kebutuhan petani (petani)
N Jumlah responden petani padi sawah (37 petani)

7. Ketepatan secara keseluruhan

$$\text{Efektivitas} = \frac{kh+kt+kw+kj+km+kJ}{6} \quad (7)$$

Dengan: kh ketepatan harga (%)
kt ketepatan tempat (%)
kw ketepatan waktu (%)
kj ketepatan jumlah (%)
km ketepatan mutu (%)
kJ ketepatan jenis (%)

Tabel 3. Kriteria penilaian efektivitas

Interval Persentase	Kriteria
k ≤ 40%	Sangat tidak efektif
40% ≤ k ≤ 60%	Tidak efektif
60% ≤ k ≤ 80%	Cukup efektif
80% ≤ k ≤ 90%	Efektif
90% ≤ k ≤ 100%	Sangat efektif

Sumber: Aziza, 2021

Sedangkan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pendistribusian pupuk bersubsidi di Kecamatan Pelaihari akan dijelaskan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Perolehan Pupuk Subsidi Secara Normatif

Menurut peraturan pemerintah mengenai distribusi pupuk subsidi yang berlandaskan kepada Permendagri No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Dalam peraturan ini banyak pihak yang terlibat dalam pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi seperti pemerintah, produsen, distributor dan pengecer resmi yang juga memiliki peran penting dan bertanggung jawab dalam implementasinya. Pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi harus memenuhi prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat harga, tepat

tempat, tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu dan tepat jenis.

Adapun alur distribusi pupuk subsidi secara normatif dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Proses produksi pupuk dilakukan oleh produsen di Lini I, yaitu lokasi gudang pupuk di area pabrik pada masing-masing produsen. Kemudian dari Lini I pupuk dikirim ke lokasi gudang produsen yang berada di area ibu kota provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau berada di luar pelabuhan (Lini II).
2. Setelah dilakukan pengemasan dalam kantong, kemudian pupuk dikirim ke lokasi gudang produsen atau distributor yang berada di wilayah kabupaten/kota yang telah ditetapkan oleh produsen (Lini III) berdasarkan surat perjanjian jual beli untuk kegiatan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan pupuk subsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya.
3. Distributor kemudian menjual pupuk subsidi kepada kelompok tani melalui kios yang telah ditetapkan oleh distributor (Lini IV) berdasarkan surat perjanjian jual beli dengan kegiatan utama melakukan penjualan secara langsung pupuk subsidi hanya kepada kelompok tani atau petani di wilayah tanggung jawabnya.

Mekanisme Perolehan Pupuk Subsidi Berdasarkan Kondisi Eksisting di Lapangan

Berikut penjelasan bagaimana petani di Kecamatan Pelaihari memperoleh pupuk subsidi sebagai berikut:

1. Kelompok tani di Kecamatan Pelaihari melakukan musyawarah yang dipimpin oleh ketua kelompok tani dan didampingi oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Isi dari RDKK tersebut harus memuat nama petani anggota kelompok tani, NIK, luas tanam dan kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun ke depan. Pengisian data RDKK di Kecamatan Pelaihari dilaksanakan pada bulan Juni hingga bulan Juli.
2. Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Pelaihari yang dibantu tim penginputan melakukan penginputan RDKK ke dalam sistem e-RDKK yang mengacu pada Sistem Informasi Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN), penginputan dilaksanakan pada bulan Agustus.
3. Pada bulan Januari dilakukan pencetakan e-RDKK dan yang kemudian ditanda tangani oleh ketua kelompok tani dan diketahui oleh penyuluh pendamping masing-masing kelompok tani.
4. Penyerahan e-RDKK yang sudah di cetak dan ditandatangani oleh ketua kelompok tani dan penyuluh pendamping ke kios pengecer resmi masing-masing yang sebelumnya telah ditunjuk.
5. Kios pengecer resmi kemudian melakukan pemesanan pupuk subsidi ke distributor, PT. Sang Hyang Seri menjadi distributor pupuk subsidi di Kecamatan Pelaihari.
6. Distributor melakukan pendistribusian pupuk subsidi ke kios pengecer resmi, kemudian pupuk subsidi diteruskan ke kelompok tani atau petani oleh kios pengecer resmi di masing-masing desa dan kelurahan yang terdapat di Kecamatan Pelaihari sesuai wilayah penugasannya.

Proses distribusi pupuk subsidi jika dilihat secara menyeluruh dan berdasarkan regulasi yang ada dengan yang berdasarkan fakta di lapangan yaitu di Kecamatan Pelaihari tidaklah berbeda, namun dalam penyusunan RDKK saat di lapangan harus benar-benar dilaksanakan dan harus direkapitulasi oleh banyak pihak agar pupuk subsidi yang kemudian akan diterima oleh petani sesuai dengan RDKK yang sudah disusun sebelumnya.

Tingkat Efektivitas Distribusi Pupuk Subsidi

Ketepatan Harga. Berikut secara rinci hasil dari penelitian mengenai ketepatan harga yang berdasarkan pendapat dari responden dan ditunjukkan pada Tabel 4 sebagai berikut.

Tabel 4. Persentase ketepatan harga pupuk subsidi di Kecamatan Pelaihari

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sesuai	4	10,81
2	Tidak Sesuai	33	89,19
	Total	37	100

Sumber: Pengolahan data primer, 2022

Berdasarkan pengolahan data primer yang dijelaskan pada Tabel 4, diketahui bahwa

terdapat 4 responden dengan persentase (10,81%) menyatakan bahwa harga pupuk bersubsidi sesuai dengan HET dan terdapat 33 responden dengan persentase (89,19%) menyatakan bahwa harga pupuk tidak sesuai dengan HET. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan petani responden bahwa terdapat biaya tambahan kurang lebih sebesar Rp.50/kg – Rp.400/kg sebagai biaya tambahan transportasi pengangkutan pupuk subsidi oleh pengecer dan sebagian dimasukkan ke dalam kas kelompok tani. Dengan hal ini, distribusi pupuk subsidi di Kecamatan Pelaihari berdasarkan ketepatan harga masih dikatakan sangat tidak efektif dengan persentase (10,81%).

Ketepatan Tempat. Berikut secara rinci hasil dari penelitian mengenai ketepatan tempat yang berdasarkan pendapat dari responden dan ditunjukkan pada Tabel 5 sebagai berikut.

Tabel 5. Persentase ketepatan tempat pupuk subsidi di Kecamatan Pelaihari

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sesuai	35	94,59
2	Tidak Sesuai	2	5,41
	Total	37	100

Sumber: Pengolahan data primer, 2022

Berasarkan pengolahan data primer yang dijelaskan pada Tabel 5, diketahui bahwa terdapat 35 responden dengan persentase (94,59%) menyatakan melakukan pembelian pupuk subsidi di lokasi gudang penyimpanan pupuk subsidi milik kelompok tani. Sedangkan terdapat 2 responden dengan persentase (5,41%) yang melakukan pembelian pupuk subsidi di pengecer resmi secara langsung dengan jarak tempuh lebih dari 5 km karena berada di luar desa dan jauh dari lokasi lahan pertanian. Hal ini terjadi karena petani mengalami kegagalan dalam berusahatani yang mengharuskan petani melakukan penyemaian kembali, disaat yang sama terjadi kelangkaan stok pupuk subsidi yang berada di lokasi gudang penyimpanan kelompok tani dan mengharuskan petani menempuh jarak yang cukup jauh untuk memperoleh pupuk subsidi. Dengan hal ini, distribusi pupuk subsidi di Kecamatan Pelaihari berdasarkan ketepatan tempat dikatakan sangat efektif dengan persentase (94,59%).

Ketepatan Waktu. Berikut secara rinci hasil dari penelitian mengenai ketepatan waktu yang berdasarkan pendapat dari responden dan ditunjukkan pada Tabel 6 sebagai berikut.

Tabel 6. Persentase ketepatan waktu pupuk subsidi di Kecamatan Pelaihari

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sesuai	12	32,43
2	Tidak Sesuai	25	67,57
	Total	37	100

Sumber: Pengolahan data primer, 2022

Berdasarkan pengolahan data primer yang dijelaskan pada Tabel 6, diketahui bahwa terdapat 12 responden dengan persentase (32,43%) yang menyatakan bahwa pupuk subsidi tersedia pada saat awal musim tanam dan 25 responden dengan persentase (67,57%) menyatakan bahwa pupuk subsidi tidak tersedia pada saat awal musim tanam. Hal tersebut terjadi karena pupuk subsidi seringkali datang terlambat dan pupuk subsidi tiba ketika sudah melewati masa tanam yang menyebabkan petani tidak melakukan pemupukan sama sekali di saat awal musim tanam. Dengan hal ini, distribusi pupuk subsidi di Kecamatan Pelaihari berdasarkan ketepatan waktu dikatakan sangat tidak efektif dengan persentase (32,43%).

Ketepatan Jumlah. Berikut secara rinci hasil dari penelitian mengenai ketepatan jumlah yang berdasarkan pendapat dari responden dan ditunjukkan pada Tabel 7 sebagai berikut.

Tabel 7. Persentase ketepatan jumlah pupuk subsidi di Kecamatan Pelaihari

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sesuai	18	48,65
2	Tidak Sesuai	19	51,35
	Total	37	100

Sumber: Pengolahan data primer, 2022

Berdasarkan pengolahan data primer yang dijelaskan pada Tabel 7, diketahui bahwa terdapat 18 responden dengan persentase (48,65%) yang menyatakan bahwa pupuk subsidi yang diperoleh petani sudah sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang dan sesuai dengan jumlah yang tertera dalam RDKK yang sudah disusun sebelumnya. Terdapat 19 responden dengan persentase (51,35%) menyatakan bahwa pupuk subsidi yang diperoleh tidak sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang dan tidak sesuai dengan jumlah yang tertera di RDKK. Hal tersebut terjadi karena

adanya faktor ekonomi dari petani dimana masih banyak petani yang kesulitan secara ekonomi dalam menebus pupuk subsidi secara penuh sesuai anjuran pemupukan berimbang dan yang sudah tertera dalam RDKK. Dengan hal ini, distribusi pupuk subsidi di Kecamatan Pelaihari berdasarkan ketepatan jumlah dikatakan tidak efektif dengan persentase (48,65%).

Ketepatan Mutu. Berikut secara rinci hasil dari penelitian mengenai ketepatan mutu yang berdasarkan pendapat dari responden dan ditunjukkan pada Tabel 8 sebagai berikut.

Tabel 8. Persentase ketepatan mutu pupuk subsidi di Kecamatan Pelaihari

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sesuai	37	100
2	Tidak Sesuai	0	0
Total		37	100

Sumber: Pengolahan data primer, 2022

Berdasarkan pengolahan data primer yang dijelaskan pada Tabel 8, diketahui bahwa seluruh responden dalam penelitian ini membeli pupuk subsidi yang berlogo SNI dan terdapat informasi mengenai kandungan dalam pupuk subsidi pada kemasan. Dengan hal ini, distribusi pupuk subsidi di Kecamatan Pelaihari berdasarkan ketepatan mutu dikatakan sangat efektif dengan persentase (100%).

Ketepatan Jenis. Berikut secara rinci hasil dari penelitian mengenai ketepatan jenis yang berdasarkan pendapat dari responden dan ditunjukkan pada Tabel 9 sebagai berikut.

Tabel 9. Persentase ketepatan jenis pupuk subsidi di Kecamatan Pelaihari

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sesuai	29	78,38
2	Tidak Sesuai	8	21,62
Total		37	100

Sumber: Pengolahan data primer, 2022

Berdasarkan pengolahan data primer yang dijelaskan pada Tabel 9, diketahui bahwa terdapat 29 responden dengan persentase (78,38%) yang menyatakan bahwa pupuk subsidi tersedia pada saat awal musim tanam dan 8 responden dengan persentase (21,62%) menyatakan bahwa jenis pupuk subsidi tidak sesuai dengan yang dibutuhkan petani padi sawah. Desa Pabahanan dengan 8 responden menyatakan bahwa petani tidak menerima pupuk jenis Urea dengan alasan yang tidak mereka ketahui penyebabnya dan sebagian petani harus membeli pupuk jenis Urea ke koperasi di desa tetangga dengan harga yang cukup mahal dari harga yang semestinya. Dengan hal ini, distribusi pupuk subsidi di Kecamatan Pelaihari berdasarkan ketepatan jenis dikatakan cukup efektif dengan persentase (78,38%).

Efektivitas Distribusi Pupuk Subsidi Secara Keseluruhan

Efektivitas distribusi pupuk subsidi secara keseluruhan merupakan rata-rata persentase dari enam indikator ketepatan. Efektivitas distribusi pupuk subsidi secara keseluruhan di Kecamatan Pelaihari dapat dilihat pada Tabel 10 sebagai berikut.

Tabel 10. Persentase efektivitas distribusi pupuk subsidi di Kecamatan Pelaihari

No.	Indikator	Persentase (%)
1	Tepat Harga	10,81
2	Tepat Tempat	94,59
3	Tepat Waktu	32,43
4	Tepat Jumlah	48,65
5	Tepat Mutu	100
6	Tepat Jenis	78,38
Rata-Rata		60,81

Sumber: Pengolahan data primer, 2022

Berdasarkan pengolahan data primer yang dijelaskan pada Tabel 10, diketahui bahwa didapat rata-rata persentase dari efektivitas distribusi pupuk subsidi secara keseluruhan sebesar 60,81%, sehingga distribusi pupuk subsidi di Kecamatan Pelaihari dapat dinyatakan cukup efektif.

Kendala Pendistribusian Pupuk Subsidi di Kecamatan Pelaihari

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani, kendala yang dihadapi oleh petani padi sawah yang menjadi responden pada penelitian ini antara lain (1) pupuk subsidi yang dibeli petani masih melebihi HET dengan persentase (89,19%), (2) pupuk subsidi datang tidak tepat waktu saat musim tanam dengan persentase (67,57%), (3) petani tidak menebus pupuk subsidi sesuai dengan RDKK karena keterbatasan permodalan dengan persentase (51,35%), (4) masih terdapat petani yang tidak menerima pupuk subsidi sesuai jenis yang dibutuhkan dengan persentase (21,62%).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala

UPT BPP Kecamatan Pelaihari bahwa masih dijumpai petani yang menjual kembali pupuk bersubsidi ke petani lain dan masih minimnya pengawasan pupuk subsidi hingga ke hilir sehingga banyak terjadi penyelewengan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, mkaa diperoleh beberapa kesimpulan dari penelitian mengenai efektivitas distribusi pupuk subsidi pada tingkat petani padi sawah di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme perolehan pupuk subsidi di Kecamatan Pelaihari tidaklah ditemukan perbedaan yang berarti dan alur dalam perolehan pupuk bersubsidi sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan regulasi mengenai mekanisme perolehan pupuk subsidi yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Berdasarkan pengukuran efektivitas distribusi pupuk subsidi secara keseluruhan yang diukur menggunakan enam indikator ketepatan yaitu tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu dan tepat jenis diperoleh persentase sebesar 60,81%, sehingga efektivitas distribusi pupuk subsidi di Kecamatan Pelaihari dinyatakan cukup efektif.
3. Pendistribusian pupuk subsidi di Kecamatan Pelaihari masih dapat ditemui berbagai kendala diantaranya adalah pupuk subsidi yang ditebus petani masih melebihi HET, masih dijumpai petani yang menjual kembali pupuk subsidi ke petani lain, pupuk subsidi yang sering kali datang terlambat, masih banyak petani yang tidak melakukan penebusan pupuk subsidi sesuai RDKK karena faktor ekonomi petani dan menyebabkan petani tidak melakukan pemupukan secara berimbang, di wilayah tertentu masih adanya kelompok tani yang tidak menerima jenis dari pupuk subsidi sesuai dengan RDKK, dan masih minimnya pengawasan pupuk subsidi hingga ke hilir sehingga rawan terjadi penyelewengan.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Diharapkan pihak-pihak yang terlibat dalam pendistribusian pupuk bersubsidi selalu meningkatkan keefektivitasan distribusi pupuk bersubsidi dimana pada ketepatan harga masih banyak petani yang beranggapan bahwa pupuk subsidi yang di beli terbilang masih cukup mahal dan berdampak pada ketepatan jumlah karena dengan mahalnya pupuk subsidi membuat petani harus mengurangi jumlah dosis pemupukan.
2. Diharapkan pihak distributor melakukan peninjauan kembali dan melakukan penambahan atau penunjukkan pengecer resmi pada setiap desa di Kecamatan Pelaihari agar dapat mengurangi beban biaya pengangkutan sehingga harga pupuk subsidi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
3. Diharapkan tim pengawas pupuk bersubsidi tingkat kecamatan melakukan kunjungan secara rutin ke kelompok tani dan melakukan sosialisasi mengenai pupuk subsidi supaya seluruh anggota kelompok tani dapat berperan serta sebagai pengawas dalam pendistribusian pupuk bersubsidi.

DAFTAR PUSTAKA

Aziza, Khoerul. 2021. Analisis Efektivitas Distribusi Pupuk Bersubsidi dengan Kartu Tani di Purwokerto Timur. IAIN Purwokerto. Purwokerto.

Balai Penyuluh Pertanian. 2022. Data Lahan Sawah Menurut Jenis Penggunaan. BPP Kecamatan Pelaihari. Pelaihari.

Jorgi, R. Satya., Siwi, G., dan Tutik, D. 2019. Hubungan Tingkat Pengetahuan Petani dengan Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Tani di Kabupaten Semarang. Universitas Diponegoro. Semarang.

Kusnandar, B.V. 2022. Turun 13% Subsidi Pupuk 2022 Dialokasikan Rp 25,3 Triliun. Databoks.Katadata.co.id. Retrieved fromhttps://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/11/turun-13-subsidi-pupuk-2022-dialokasikan-rp-253-triliun.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/DAG/PER/4/2013. 2013. Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Kementerian Perdagangan. Jakarta.